Indonesia Economic Journal
Vol. 2, No. 2, Tahun 2026
doi.org/10.63822/zzgbrw09
Hal. 3638-3654
https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/iej
eISSN 3090-4552 & pISSN 3090-4609

# Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi tentang Siklus Ekonomi dan Inflasi serta Relevansinya terhadap Krisis Ekonomi Modern

**Radya Amkanaki Niarno[1], Syifah Jalianty[2], Vairuz Zulva Karima[3], Kayla Zahrtus Syta[4], Muhamad Masrur[5]**
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Indonesia[1,2,3,4,5]

*Email: radya.amkanaki.niarno25026@mhs.uingusdur.ac.id[1], syifa.jalianty25062@mhs.uingusdur.ac.id[2], vairus.zulva.karima25055@mhs.uingusdur.ac.id[3], kayla.zahratus.syta25026@mhs.uingusdur.ac.id[4], m.masrur@uingusdur.ac.id[5]

Diterima: 25-10-2026 | Disetujui: 31-10-2026 | Diterbitkan: 02-11-2026

***ABSTRACT***

*Recurring economic crises show that economic cycles and inflation are interrelated and difficult to separate in policy analysis. This study aims to analyze Ibn Khaldun's thought on economic cycles and Al-Maqrizi's thought on inflation, as well as their relevance to modern economic crises. The study uses a qualitative approach with a library research method to examine the ideas of both thinkers in depth. Primary data were drawn from the Muqaddimah and Ighathat al-Ummah bi Kashf al-Ghummah, while secondary data came from related books and journal articles, analyzed using a descriptive-comparative method. The results show that Ibn Khaldun viewed economic rise and decline as part of a cycle influenced by tax burdens, productivity, and the policies of rulers. Excessive taxation weakens the incentive to produce, which ultimately reduces state revenue. Al-Maqrizi divided inflation into natural inflation, caused by disasters such as famine, and inflation caused by human error, such as corruption, poor financial management, and monetary policies that damage the value of currency. Both place state policy as the determining factor in economic stability but differ in analytical focus: Ibn Khaldun's approach is macro-cyclical, while Al-Maqrizi's is monetary. Their thought remains relevant as a framework for understanding inflation and economic crises today, particularly in emphasizing just governance, proportionate taxation, and the preservation of monetary stability.*

***Keywords***: *Ibn Khaldun; Al-Maqrizi; economic cycles; inflation; economic crisis*

**ABSTRAK**

Krisis ekonomi yang terus berulang menunjukkan bahwa siklus ekonomi dan inflasi memiliki keterkaitan erat dan sulit dipisahkan dalam analisis kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang siklus ekonomi dan pemikiran Al-Maqrizi tentang inflasi serta relevansinya terhadap krisis ekonomi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji pemikiran kedua tokoh secara mendalam. Data primer bersumber dari kitab Muqaddimah dan Ighatsah al-Ummah bi Kashf al-Ghummah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan artikel jurnal yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun memandang naik dan turunnya perekonomian sebagai bagian dari suatu siklus yang dipengaruhi oleh beban pajak, produktivitas, dan kebijakan penguasa. Pajak yang berlebihan dapat melemahkan motivasi masyarakat untuk berproduksi sehingga pada akhirnya menurunkan penerimaan negara. Sementara itu, Al-Maqrizi membedakan inflasi menjadi inflasi alami yang disebabkan oleh bencana seperti kelaparan dan inflasi akibat kesalahan manusia, seperti korupsi, buruknya pengelolaan keuangan, serta kebijakan moneter yang merusak nilai mata uang. Kedua tokoh menempatkan kebijakan negara sebagai faktor penentu stabilitas ekonomi, tetapi memiliki fokus analisis yang berbeda, yaitu makro-siklikal pada Ibnu Khaldun dan moneter pada Al-Maqrizi. Pemikiran keduanya tetap relevan sebagai kerangka untuk memahami inflasi dan krisis ekonomi modern, khususnya dalam menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil, perpajakan yang proporsional, dan pemeliharaan stabilitas moneter.

**Kata Kunci:** Ibnu Khaldun; Al-Maqrizi; siklus ekonomi; inflasi; krisis ekonomi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Niarno, R. A. ., Jalianty, S. ., Karima, V. Z. ., Syta, K. Z., & Masrur, M. . (2026). Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi tentang Siklus Ekonomi dan Inflasi serta Relevansinya terhadap Krisis Ekonomi Modern. Indonesia Economic Journal, 2(2), 3638-3654. https://doi.org/10.63822/zzgbrw09

## PENDAHULUAN

Krisis ekonomi merupakan fenomena yang terus berulang dalam sejarah peradaban manusia. Krisis moneter Asia 1997-1998, krisis keuangan global 2008, hingga lonjakan inflasi pascapandemi COVID-19 menunjukkan bahwa gejolak ekonomi tidak pernah benar-benar hilang, meskipun teori dan instrumen kebijakan terus berkembang. Pola pasang surut ini menunjukkan bahwa siklus ekonomi dan inflasi saling berkaitan. Inflasi sendiri merupakan persoalan yang muncul berulang sejak manusia mengenal uang sebagai alat tukar (A. Alwa, 2022a). Persoalan inflasi juga nyata dalam konteks Indonesia. (Shawab & Mujaddid, 2026a) menelaah relevansi teori inflasi Al-Maqrizi terhadap dinamika inflasi Indonesia pascapandemi 2020–2024, sedangkan (A. Alwa, 2022)membandingkan pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi dengan kondisi inflasi Indonesia berdasarkan data resmi BPS dan Bank Indonesia.

Inflasi tahunan Indonesia naik menjadi 3,28% pada September 2026 dari 3,19% pada bulan sebelumnya, kira-kira sejalan dengan ekspektasi pasar sebesar 3,3%. Data tersebut menunjukkan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, tetapi persoalan yang langsung memengaruhi daya beli masyarakat.

Urgensi kajian ini juga terletak pada risiko inflasi yang tinggi. Alwa dan Wahyudi (2022) menegaskan bahwa inflasi tinggi yang tidak ditangani secara tepat dapat berujung pada depresi ekonomi. IMF (2022) menekankan perlunya menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter, sementara kebijakan fiskal diarahkan untuk meringankan beban biaya hidup. Kedua penekanan tersebut menunjukkan bahwa perumusan kebijakan membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang akar masalah.

Khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik telah membahas persoalan serupa jauh sebelum teori modern lahir. Ibnu Khaldun (1332-1406) dalam Muqaddimah membahas teori pertumbuhan dan siklus bisnis, keuangan publik, serta peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi (Borhan, 2022). Menurutnya, pembangunan ekonomi harus ditopang oleh keadilan, stabilitas politik, produktivitas masyarakat, dan kebijakan pajak yang adil (Sendiabsari & Budiarti, 2026). Dalam ekonomi modern, inflasi umumnya dijelaskan melalui kerangka konvensional, seperti inflasi tarikan permintaan, dorongan biaya, dan inflasi campuran. (Romadhan et al., 2024) yang membandingkan pemikiran Al-Maqrizi dan Keynes menyimpulkan bahwa ekonomi konvensional lebih berfokus pada faktor eksternal dan mekanisme pasar, sedangkan perspektif Islam menekankan aspek moral dan tanggung jawab manusia dalam mengendalikan inflasi.

Perbedaan ini penting karena sebab inflasi yang disorot Al-Maqrizi, yaitu korupsi, pajak yang tidak wajar, dan pencetakan uang secara berlebihan, berakar pada kualitas tata kelola, bukan semata mekanisme pasar. Di sisi lain, penelitian yang sama menemukan kemiripan: pandangan Al-Maqrizi tentang kelebihan peredaran uang tembaga (fulus) sejalan dengan mazhab monetaris yang mengaitkan inflasi dengan jumlah uang beredar (Romadhan dkk., 2024b). Temuan ini menunjukkan bahwa pemikiran klasik layak dijadikan kerangka analisis yang melengkapi teori konvensional.

Sementara itu, Al-Maqrizi (1364-1442), murid Ibnu Khaldun, menulis Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah untuk menjelaskan penyebab krisis pangan dan ekonomi pada masa Dinasti Mamluk. Ia membedakan inflasi menjadi inflasi alami dan inflasi akibat kesalahan manusia (Shawab & Mujaddid, 2026b). Kajian empiris lintas negara menunjukkan bahwa inflasi berhubungan positif dengan faktor kesalahan manusia seperti korupsi, pajak, dan jumlah uang beredar, sedangkan bencana alam tidak terbukti signifikan pada tingkat negara (A. Alwa, 2022b).

Pemikiran kedua tokoh bertemu pada hubungan antara pajak dan produksi. Al-Maqrizi menjelaskan

bahwa pajak yang tidak wajar membuat petani kehilangan motivasi bekerja, sehingga produksi pangan menurun dan harga naik (Romadhan et al., 2024). Logika ini sejalan dengan gagasan Ibnu Khaldun bahwa beban pajak yang berat melemahkan aktivitas produktif dan mempercepat kemunduran (Ghazanfar & Islahi, 1990). Dengan demikian, kebijakan fiskal yang buruk dapat memicu kontraksi sekaligus inflasi, sehingga siklus ekonomi dan inflasi tidak dapat dianalisis secara terpisah.

Kedua tokoh menempatkan kebijakan negara sebagai faktor penting bagi stabilitas ekonomi, tetapi dengan sudut pandang berbeda. Ibnu Khaldun menawarkan analisis makro yang bersifat siklikal, sedangkan Al-Maqrizi memusatkan perhatian pada aspek moneter. Perbedaan ini membuka peluang untuk membaca keduanya secara komplementer. Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi memiliki hubungan intelektual yang erat. Al-Maqrizi diketahui pernah belajar kepada Ibnu Khaldun (Shawab & Mujaddid, 2026b). Hubungan guru dan murid ini memberi alasan kuat untuk membaca keduanya secara berkesinambungan: gagasan siklus dan peran negara pada Ibnu Khaldun dapat dibaca sebagai kerangka makro, sedangkan analisis inflasi Al-Maqrizi sebagai penerapan konkret pada krisis yang ia saksikan langsung di Mesir.

Meskipun pemikirannya orisinal, Al-Maqrizi masih relatif kurang dikaji dalam literatur Indonesia (Al Mujaddid, 2026). Kondisi ini membuka ruang bagi penelitian yang menempatkannya berdampingan dengan gurunya, Ibnu Khaldun, sehingga kontribusi keduanya dapat dibaca sebagai satu rangkaian pemikiran yang saling melengkapi.

Penelitian terdahulu telah membandingkan pemikiran keduanya tentang penyebab inflasi dan implikasinya di Indonesia (A. Alwa, 2022b). Namun, kajian yang secara khusus menempatkan teori siklus ekonomi Ibnu Khaldun berdampingan dengan teori inflasi Al-Maqrizi sebagai kerangka membaca krisis ekonomi modern masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang siklus ekonomi dan pemikiran Al-Maqrizi tentang inflasi, serta menelaah relevansinya terhadap krisis ekonomi modern. Siklus ekonomi dan inflasi sulit dipisahkan dalam praktik. Inflasi yang tinggi dapat memperdalam fase kontraksi, sementara fase kontraksi memengaruhi kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah. IMF (2022) menegaskan bahwa kebijakan moneter perlu dijaga untuk memulihkan stabilitas harga, sementara kebijakan fiskal diarahkan meringankan beban biaya hidup. Dalam kerangka klasik, dua dimensi ini sejajar dengan pemikiran kedua tokoh: dimensi fiskal dan pajak pada Ibnu Khaldun (Ghazanfar & Islahi, 1990) serta dimensi moneter dan tata kelola pada Al-Maqrizi (Al-Maqrizi, 1994). Karena itu, membaca keduanya secara terpadu berpotensi memberi gambaran yang lebih utuh tentang akar dan penanganan krisis.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian pemikiran ekonomi Islam klasik dengan perspektif komparatif yang menggabungkan analisis siklus dan inflasi. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan akademisi dalam membaca krisis ekonomi kontemporer. Artikel ini disusun dalam beberapa bagian: pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan yang memuat pemikiran masing-masing tokoh, analisis komparatif, dan relevansinya terhadap krisis modern, serta kesimpulan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library

research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa gagasan, konsep, dan argumen dalam teks klasik, bukan data lapangan yang dapat diukur secara statistik. Penelitian kualitatif studi pustaka bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif, sehingga proses dan makna di balik teks dapat ditonjolkan (Adlini, Anisya Octavia, 2022a). Tinjauan kepustakaan juga berfungsi menggali pemahaman mendalam atas suatu persoalan dan memastikan kajian tidak berhenti pada pengulangan temuan terdahulu (Mahanum, 2021a).

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Aspek deskriptif dipakai untuk memaparkan pemikiran Ibnu Khaldun tentang siklus ekonomi dan pemikiran Al-Maqrizi tentang inflasi secara utuh. Aspek komparatif dipakai untuk menemukan titik temu dan perbedaan keduanya, lalu menelaah relevansinya terhadap krisis ekonomi modern.

**Sumber Data**

Sumber data terdiri atas dua kategori. Pertama data primer, yakni berupa dua karya utama kedua tokoh. Untuk Ibnu Khaldun, yaitu Muqaddimah, khususnya pembahasan tentang perkembangan dan kemunduran negara, pajak, produktivitas, dan peran penguasa dalam kegiatan ekonomi. Untuk Al-Maqrizi, yaitu Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah, khususnya pembahasan tentang sebab krisis pangan, jenis-jenis inflasi, dan kebijakan moneter pada masa Dinasti Mamluk.

Kedua data sekunder, yakni berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kedua tokoh. Kajian tentang teori inflasi Al-Maqrizi, perbandingan pemikiran kedua tokoh dengan kondisi inflasi Indonesia, dan analisis ekonomi modern yang relevan termasuk dalam kategori ini. Data sekunder membantu menafsirkan teks primer dan menghubungkannya dengan konteks kontemporer, termasuk data inflasi resmi dan rekomendasi kebijakan lembaga internasional.

**Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menghimpun dan menelaah dokumen tertulis yang relevan dengan fokus kajian) (Jailani, 2023). Prosesnya mengikuti tahapan studi pustaka yang dikemukakan (Adlini, Anisya Octavia, 2022b) yakni dengan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu, dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Secara operasional, langkahnya sebagai berikut. Pertama, penelusuran literatur dilakukan melalui basis data jurnal dan repositori ilmiah dengan kata kunci seperti Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, siklus ekonomi, inflasi, dan krisis ekonomi.

Kedua, seleksi sumber didasarkan pada kesesuaian dengan fokus penelitian, kejelasan identitas penulis dan penerbit, serta kebaruan. Untuk sumber sekunder, penelitian ini mengutamakan artikel jurnal yang terbit dalam lima tahun terakhir. Ketiga, pencatatan dilakukan dengan mengutip gagasan inti, istilah kunci, dan argumen setiap tokoh, lengkap dengan identitas sumbernya agar dapat ditelusuri kembali.

**Teknik Analisis Data**

Data dianalisis dengan metode deskriptif-komparatif melalui beberapa tahap. Pertama, reduksi data. Seluruh catatan dipilah dan dipadatkan agar hanya informasi yang berkaitan dengan siklus ekonomi dan inflasi yang dianalisis. Tahap ini juga menghindari kelemahan yang kerap muncul dalam kajian pustaka, yakni sekadar menyajikan ringkasan sumber satu per satu tanpa keterkaitan yang sistematis

(Mahanum, 2021b).

Kedua, penyajian data deskriptif. Pemikiran Ibnu Khaldun disusun berdasarkan unsur-unsur siklus: beban pajak, insentif produksi, kebijakan penguasa, dan dampaknya terhadap pendapatan negara. Pemikiran Al-Maqrizi disusun berdasarkan klasifikasi inflasi alami dan inflasi akibat kesalahan manusia, termasuk korupsi, pengelolaan keuangan yang buruk, dan kebijakan moneter yang merusak nilai mata uang.

Ketiga, analisis komparatif. Kedua pemikiran dibandingkan pada empat dimensi: (a) fokus analisis, yaitu makro-siklikal pada Ibnu Khaldun dan moneter pada Al-Maqrizi; (b) peran negara dalam stabilitas ekonomi; (c) hubungan pajak dengan produksi dan harga; dan (d) rekomendasi kebijakan yang tersirat. Hasilnya dipetakan untuk melihat titik temu dan perbedaan, lalu dibaca secara komplementer, dengan siklus ekonomi sebagai kerangka makro dan inflasi sebagai penerapan konkret pada krisis.

Keempat, penarikan kesimpulan dan kontekstualisasi. Temuan dari analisis komparatif dihubungkan dengan fenomena krisis modern, seperti krisis moneter 1997-1998, krisis keuangan global 2008, dan inflasi pascapandemi. Penelitian ini menilai kesesuaian kerangka klasik dengan prinsip tata kelola yang adil, perpajakan yang proporsional, dan stabilitas moneter. Analisis ini bersifat interpretatif dan tidak dimaksudkan menguji hipotesis secara statistik.

### Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa langkah. Pertama, pemikiran kedua tokoh dirujuk langsung pada karya primer, tidak hanya pada kutipan dalam literatur sekunder. Kedua, interpretasi atas teks primer dibandingkan dengan beberapa sumber sekunder untuk mengurangi bias penafsiran tunggal (triangulasi sumber). Ketiga, setiap kutipan dan paraphrase dicatat dengan identitas sumber yang lengkap sehingga dapat diverifikasi pembaca. Keempat, keterbatasan kajian dinyatakan secara terbuka, yaitu analisis bertumpu pada teks dan literatur sehingga kesimpulannya belum diuji dengan data empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Siklus Ekonomi

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada 1332 dan wafat pada 1406. Ia pernah bertugas dalam administrasi negara sebelum menulis *al-'Ibar* dan merevisinya selama tinggal di Mesir, sedangkan gagasan ekonominya terutama dibahas melalui *Muqaddimah* (Rahim & Yani, 2021). Empat konsep ekonomi dalam karyanya meliputi siklus peradaban, nilai tenaga kerja, pajak dan peran negara, serta permintaan dan penawaran (Rahim & Yani, 2021). Pandangannya tentang tenaga kerja, produksi, pajak, dan penerimaan negara berkaitan dengan teori siklus ekonomi yang dikaitkan dengan *asabiyyah*, yakni kohesi sosial yang menjelaskan naik dan turunnya peradaban (Fajar, 2025).

Ibnu Khaldun memandang kehidupan ekonomi sebagai bagian dari daur hidup peradaban. Pipit dkk. (2025) menjelaskan bahwa dinasti melewati empat tahap, yaitu kelahiran, pertumbuhan, kematangan, dan kemunduran, sementara siklus ekonomi pada umumnya terdiri atas fase pertumbuhan, puncak, dan kontraksi. Pada awal berdirinya negara, pajak yang rendah mendorong kegiatan usaha, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan. Seiring bertambahnya kebutuhan negara, pajak dinaikkan, semangat berusaha melemah, produksi menurun, dan perekonomian akhirnya runtuh (Pipit Pipit dkk.,

2025a).

Kunci dari perubahan itu adalah insentif untuk berproduksi. Pajak yang ringan bagi pelaku usaha dianjurkan karena memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara, sedangkan kenaikan tarif di atas titik tertentu justru menurunkan penerimaan karena mendorong penghindaran dan penggelapan pajak (Pipit Pipit dkk., 2025a). Alwa dan Wahyudi (2022) merangkum pandangan yang sejalan: penerimaan yang terlalu rendah membuat negara tidak dapat menjalankan fungsinya, sedangkan pajak yang terlalu tinggi menaikkan biaya produksi dan menekan pendapatan produsen maupun pedagang. Pipit dkk. (2025) mengaitkan gagasan ini dengan kurva Laffer, tetapi penyamaan tersebut merupakan tafsir penulis modern dan bukan pernyataan yang dibuat Ibnu Khaldun sendiri.

Aspek keadilan juga mendapat tempat. Pipit dkk. (2025) mengutip surat Thahir bin al-Husain kepada putranya yang melarang membebani seseorang di luar kemampuannya, dan membandingkan prinsip keadilan itu dengan asas kesetaraan dalam pemikiran Adam Smith. Dalam kerangka syariah, pajak mencakup zakat, kharaj (pajak bumi), dan jizyah (pajak kepala). Pipit dkk. (2025) juga menempatkan pajak sebagai instrumen keadilan sosial dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) yang dapat menjadi acuan moral bagi reformasi perpajakan di Indonesia

Kerangka siklus tersebut memberi konteks bagi mekanisme fiskal di atas. Pipit dkk. (2025) menambahkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi ketersediaan pangan dan lapangan kerja dapat memicu kelangkaan dan krisis, sehingga keseimbangan antara penerimaan pajak dan pengeluaran negara perlu dijaga. Ketika kebutuhan belanja negara membengkak dan pungutan bertambah, kemerosotan politik dan kemerosotan ekonomi dapat saling menguatkan. Rangkaian ini merupakan sintesis penulis atas sumber sekunder, bukan rumusan yang dinyatakan secara eksplisit dalam satu rujukan.

Perlu dicatat pula bahwa sebagian usulan penerapan modern dalam Pipit dkk. (2025), seperti pengurangan pajak pertambahan nilai pada kebutuhan pokok dan klaim bahwa Ibnu Khaldun menganjurkan penghapusan pajak tidak langsung, harus dibaca hati-hati karena jenis pajak tersebut belum ada pada masanya. Selain pajak, Alwa dan Wahyudi (2022) menyebut bahwa Ibnu Khaldun mengaitkan tekanan harga dengan permintaan yang naik, biaya produksi, uang yang tumbuh lebih cepat daripada produksi, perdagangan tidak produktif, serta pemborosan dan korupsi. Dengan demikian, siklus ekonomi dalam kerangka Ibnu Khaldun tidak terpisah dari persoalan harga, dan hal ini menjadi pintu masuk untuk membacanya bersama analisis inflasi Al-Maqrizi.

**Pemikiran Al-Maqrizi tentang Inflasi**

Menurut Ghalib dkk. (2025), Al-Maqrizi lahir pada 766 H (1364–1365 M) dan wafat di Kairo pada 1442. Ia memulai karier sebagai juru tulis pemerintahan di Diwan al-Insha, lalu menjabat muhtasib atau pengawas pasar di Kairo sejak 791 H, peran yang mempertemukannya dengan kekacauan harga dan pengelolaan pasar (Darul, 2025a). Ia dipengaruhi Ibnu Khaldun yang ditemuinya di Kairo, menulis lebih dari seratus karya, dan menjadikan *Ighatsah al-Ummah bi Kashf al-Ghummah* sebagai teks pokok teori inflasinya (Darul, 2025a). Al Mujaddid (2026) menjelaskan bahwa kitab itu ditulis sebagai tanggapan atas kelaparan dan krisis moneter di Mesir pada 805 - 808 H (1403 - 1406 M) di bawah Mamluk Burji, dan bahwa guncangan alam dipandang memperburuk keadaan sementara akar masalahnya adalah tata kelola yang buruk (Al Mujaddid, 2026a). Kaitan antara pengalaman sebagai pengawas pasar dan ketajaman analisis harganya merupakan pembacaan penulis, bukan pernyataan sumber.

Alwa dan Wahyudi (2022) merangkum definisi Al-Maqrizi sebagai kenaikan harga yang bersifat umum dan berkelanjutan, disertai kelangkaan barang, sehingga masyarakat harus membayar lebih untuk barang yang sama (Alwa & Wahyudi, 2022). Ia membedakan penyebab inflasi ke dalam dua golongan, yaitu inflasi alami dan inflasi akibat kesalahan manusia (M. A. A. Alwa & Wahyudi, 2022a).

Inflasi alami bersumber dari bencana lingkungan seperti kekeringan dan gagal panen. Kelangkaan mendorong harga naik dan transaksi terhenti, bahkan dapat disusul kelaparan, wabah, dan kematian (Darul, 2025a). Pemerintah kemudian mengeluarkan banyak belanja bantuan, sehingga kas negara terkuras dan defisit muncul (Darul, 2025a). Kenaikan harga pangan menjalar ke barang lain, upah, dan jasa, serta dampaknya dapat bertahan setelah bencana berlalu (Fadilah dkk., 2026a). Guncangan pasokan dalam kerangka Al-Maqrizi dengan demikian dapat berubah menjadi tekanan harga yang meluas.

Inflasi akibat kesalahan manusia disebabkan oleh tiga faktor, yaitu korupsi dan pengelolaan pemerintahan yang buruk, pajak yang berlebihan, serta peredaran uang yang berlebihan (Darul., 2025; Al Mujaddid, 2026). Pada faktor pertama, pejabat diangkat melalui suap, bukan kecakapan, lalu menyalahgunakan jabatannya sehingga semangat kerja dan penerimaan negara menurun (Darul, 2025a). Praktik ini membuat orang meninggalkan pekerjaan dan daerahnya sehingga produksi dan penerimaan pajak turun (Fadilah dkk., 2026a). Pada faktor kedua, beban pajak diteruskan kepada petani melalui sewa yang lebih tinggi, biaya pertanian naik, dan petani meninggalkan lahan sehingga produksi pangan menyusut (Fadilah dkk., 2026a). Pajak atas petani dan pedagang menaikkan biaya yang kemudian dibebankan kepada konsumen (Al Mujaddid, 2026a).

Pada faktor ketiga, negara mencetak koin tembaga (*fulus*) yang nilai intrinsiknya jauh di bawah nilai nominalnya, antara lain untuk menutup defisit, bahkan dengan paksaan penggunaan, sampai *fulus* menguasai peredaran uang (Darul, 2025a). Dirham perak menjadi langka dan nilai mata uang menurun (Fadilah dkk., 2026a). Pencetakan *fulus* berlebihan disebut sebagai penyebab paling merusak dalam inflasi berkepanjangan pada masa Burji (Al Mujaddid, 2026a).

Dari sisi standar moneter, emas dan perak (*dinar* dan *dirham*) dipandang sebagai satu-satunya standar nilai yang dapat diandalkan, karena harga yang dinyatakan dalam logam mulia jarang melonjak, sedangkan peredaran uang sebaiknya dibatasi sesuai kebutuhan transaksi kecil (Darul, 2025a). Logam bernilai intrinsik melindungi harga dari perluasan jumlah uang yang sewenang-wenang, dan menggambarkannya sebagai bentuk awal teori kuantitas uang; karakterisasi tersebut perlu diperlakukan sebagai tafsir penulis (Al Mujaddid, 2026a). Mata uang berbasis emas dan perak juga dapat berfungsi sebagai standar nilai (Harahap, 2023).

Dari sisi solusi, Al-Maqrizi mengusulkan kembali ke *dinar* dan *dirham* sebagai basis moneter, menghindari pencetakan uang yang sewenang-wenang, korupsi, monopoli, dan penimbunan (*ihtikar*), memperkuat pengawasan pasar, meningkatkan produktivitas sektor riil, serta melakukan pembenahan moral (Darul, 2025a). Ia juga menekankan pengelolaan moneter yang sehat, keseimbangan dalam penukaran mata uang, dan pengurangan korupsi (M. A. A. Alwa & Wahyudi, 2022a). Kajian yang sama mengusulkan zakat dan khumus sebagai penstabil fiskal serta penegakan hukum antikorupsi yang lebih kuat, dan mengutip perkiraan Parisi (2018) bahwa pengendalian korupsi dapat menurunkan inflasi sekitar 1% (M. A. A. Alwa & Wahyudi, 2022a). Angka tersebut merupakan kutipan sekunder yang tidak diuji dalam kajian tersebut, sehingga perlu diperlakukan dengan hati-hati.

Beberapa klaim dalam literatur sekunder tidak jelas dasarnya pada teks Al-Maqrizi sendiri. Darul.

(2025), misalnya, memuat penilaian bahwa ia pemikir Muslim abad pertengahan terakhir yang mengaitkan uang dengan inflasi, serta penerapan hierarki kebutuhan (*dharuriyyah*, *hajjiyah*, *tahsiniyyah*) pada etika produksi dan konsumsi (Darul, 2025a). Penelitian ini memperlakukan klaim tersebut sebagai pembacaan penulisnya, bukan kesimpulan yang sudah teruji.

**Analisis Komparatif**

Kedua pemikiran dibandingkan pada empat dimensi yang ditetapkan dalam metode penelitian, yaitu fokus analisis, peran negara, hubungan pajak dengan produksi dan harga, serta rekomendasi kebijakan yang tersirat.

| Dimensi | Ibnu Khaldun | Al-Maqrizi |
|---|---|---|
| Fokus analisis | Makro-siklikal: naik dan turunnya peradaban dalam tahap kelahiran hingga kemunduran, dengan pajak dan insentif produksi sebagai penggerak (Pipit Pipit dkk., 2025a) | Moneter dan harga: klasifikasi inflasi alami dan inflasi akibat kesalahan manusia (Alwa & Wahyudi, 2022; Darul, 2025) |
| Peran negara | Kebutuhan belanja yang membesar mendorong kenaikan pajak sehingga produksi turun (Pipit Pipit dkk., 2025a) | Korupsi, pajak berlebihan, dan pengelolaan uang yang buruk menjadi sumber inflasi (Darul, 2025; Al Mujaddid, 2026) |
| Pajak, produksi, dan harga | Pajak berat menurunkan semangat usaha, produksi, lalu penerimaan; biaya produksi naik (Pipit dkk., 2025; Alwa & Wahyudi, 2022) | Pajak berlebihan menaikkan biaya pertanian sehingga petani meninggalkan lahan dan harga pangan naik (Fadilah dkk., 2026; Darul, 2025) |
| Rekomendasi tersirat | Pajak rendah, adil, dan sesuai syariah, serta keseimbangan penerimaan dan pengeluaran negara (Pipit dkk., 2025) | Pejabat yang cakap, standar moneter yang terjaga, pengawasan pasar, dan produktivitas sektor riil (Darul, 2025a) |

Titik temu keduanya berada pada peran negara dan hubungan pajak dengan produksi. Dalam kerangka Ibnu Khaldun, pajak yang memberatkan melemahkan kegiatan produktif dan penerimaan negara. Dalam kerangka Al-Maqrizi, pajak yang sama membuat petani kesulitan berproduksi sehingga pasokan pangan turun dan harga naik. Kebijakan fiskal yang buruk karena itu dapat memicu kontraksi sekaligus tekanan harga, sehingga siklus ekonomi dan inflasi sulit dianalisis secara terpisah. Keduanya juga menempatkan kualitas tata kelola, yakni keadilan pemungutan, kejujuran aparat, dan disiplin belanja, sebagai penentu stabilitas.

Perbedaannya terletak pada penekanan. Ibnu Khaldun menyajikan kerangka besar tentang lintasan peradaban dari kejayaan menuju kemunduran, sedangkan Al-Maqrizi menelaah secara rinci bagaimana krisis harga terbentuk, terutama lewat pengelolaan uang. Pembedaan makro-siklikal dan moneter ini sebaiknya dibaca sebagai perbedaan penekanan, bukan pemisahan tegas, sebab Ibnu Khaldun juga membahas uang yang tumbuh lebih cepat daripada produksi, sementara Al-Maqrizi juga menyinggung

pajak (M. A. A. Alwa & Wahyudi, 2022a). Hubungan Al-Maqrizi sebagai orang yang dipengaruhi Ibnu Khaldun memberi alasan tambahan untuk membacanya berkesinambungan: gagasan siklus dan peran negara berfungsi sebagai kerangka makro, dan analisis inflasi Al-Maqrizi sebagai penerapan konkret pada krisis yang ia saksikan sendiri (Darul, 2025a)

Jika kedua kerangka digabungkan, tersusun dua lintasan yang saling menguatkan. Pada lintasan fiskal, kebutuhan belanja penguasa mendorong tarif naik, semangat usaha turun, penerimaan menyusut, dan tekanan fiskal makin besar. Pada lintasan moneter, defisit ditutup dengan uang yang bernilai rendah, uang beredar tumbuh lebih cepat daripada produksi, harga naik, dan uang yang baik tersingkir dari peredaran. Kedua lintasan bertemu pada pasokan: ketika produksi turun akibat pajak atau bencana, harga meningkat, dan kenaikan harga itu pada gilirannya menekan pelaku usaha serta daya beli. Gambaran ini merupakan sintesis penulis atas uraian Pipit Pipit. (2025), Darul. (2025), Fadilah. (2026), dan Al Mujaddid (2026), sehingga posisi komplementer kedua tokoh dapat dipahami sebagai rangkaian sebab yang saling terhubung, bukan dua teori yang berdiri sendiri

Pembacaan ini juga dapat dipetakan secara terbatas pada kategori inflasi konvensional. Pajak yang menaikkan biaya pertanian dan biaya produksi menyerupai tekanan dari sisi biaya (Fadilah dkk., 2026; Alwa & Wahyudi, 2022). Uang yang beredar lebih cepat daripada produksi menyerupai penjelasan moneter (Alwa & Wahyudi, 2022; Al Mujaddid, 2026). Kenaikan permintaan sebagai salah satu sumber tekanan harga dalam pandangan Ibnu Khaldun menyerupai tarikan permintaan (M. A. A. Alwa & Wahyudi, 2022a). Sementara itu, gagal panen akibat bencana dalam klasifikasi Al-Maqrizi sejajar dengan guncangan pasokan. Pemetaan ini hanyalah padanan konseptual, karena kedua tokoh tidak menggunakan istilah tersebut dan tidak merumuskan model matematis. Nilai lebihnya terletak pada penekanan moral dan kelembagaan, yaitu bahwa kejujuran aparat dan keadilan pemungutan ikut menentukan hasil ekonomi.

Beberapa keterbatasan perlu diperhatikan dalam perbandingan ini. Sumber yang dipakai merupakan kajian sekunder dan tidak seluruhnya membahas kedua tokoh sekaligus; Pipit Pipit. (2025), Darul. (2025), Fadilah dkk. (2026), dan Al Mujaddid (2026), misalnya, masing-masing berfokus pada salah satu tokoh. Perbedaan konteks juga nyata: Mesir pada masa Mamluk memakai koin logam, sedangkan ekonomi modern bertumpu pada uang fiat, bank sentral, dan sistem keuangan yang jauh lebih kompleks. Dengan demikian, perbandingan ini berfungsi sebagai alat bantu berpikir, bukan model prediksi.

**Relevansi terhadap Krisis Ekonomi Modern**

Krisis 1997-1998 di Indonesia menunjukkan bagaimana kerentanan yang tertutup oleh pertumbuhan tinggi dapat meledak. Menurut Chalandra dkk. (2025), Indonesia sebelum krisis dipandang stabil dengan pertumbuhan di atas 7% per tahun dan inflasi di bawah 10%, tetapi bergantung pada modal asing jangka pendek dan utang valuta asing yang tidak dilindung nilai. Devaluasi baht Thailand pada Juli 1997 memicu kepanikan regional dan pelarian modal. Namun, Chalandra dkk. (2025) berargumen bahwa guncangan eksternal itu hanya pemicu, sedangkan penyebab yang lebih dalam adalah ketergantungan pada utang luar negeri swasta, rupiah yang terlalu kuat nilainya, perbankan yang rapuh, dan ekonomi oligarkis yang bertumpu pada konglomerat.

Dampaknya berlapis. Rupiah melemah tajam hingga sekitar Rp16.800-Rp17.000 per dolar AS pada awal 1998, dan perusahaan yang berutang dolar menghadapi beban pembayaran yang melonjak sehingga terjadi kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (Calanda dkk., 2025). Pada November 1997

pemerintah menutup 16 bank swasta tanpa penanganan yang transparan dan tanpa lembaga penjamin simpanan, sehingga memicu penarikan dana massal yang menjalar ke bank sehat. Badan Penyehatan Perbankan Nasional dibentuk pada Februari 1998 untuk merestrukturisasi bank dan mengelola aset bermasalah. Pada Oktober 1997 Indonesia menandatangani kesepakatan dengan IMF untuk paket sekitar 43 miliar dolar AS yang memuat sekitar 50 langkah reformasi; kebijakan tersebut dikritik karena menaikkan harga barang pokok dan menerapkan kebijakan moneter ketat saat resesi (Calanda dkk., 2025). Artikel itu juga melaporkan kontraksi PDB sekitar 13,7%, kenaikan kemiskinan dari sekitar 15% menjadi lebih dari 33%, dan puncak inflasi sekitar 77%, meskipun sejumlah angka dalam artikel tersebut tidak konsisten satu sama lain sehingga perlu dibaca sebagai perkiraan.

Krisis moneter 1997 - 1998 merupakan hasil interaksi antara kerentanan domestik dan tekanan eksternal, di mana sistem perbankan yang rapuh, utang luar negeri yang tinggi, serta lemahnya tata kelola keuangan berpadu dengan spekulasi mata uang dan penarikan modal asing sehingga mempercepat tekanan terhadap rupiah; pemerintah kemudian merespons melalui pemulihan sektor perbankan, jaring pengaman sosial, dan kerja sama dengan IMF (Rahmadhona dkk., 2024) . Dalam kerangka Ibnu Khaldun, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai fase kemunduran yang didahului akumulasi risiko pada masa kemakmuran, ketika ekspansi kredit dan utang tidak diimbangi kewaspadaan terhadap kerentanan ekonomi; kelemahan perbankan dan beban utang luar negeri menjadi faktor yang mempercepat kemunduran tersebut (Pipit Pipit dkk., 2025b) . Perspektif Al-Maqrizi memperkuat pembacaan ini dengan menekankan bahwa krisis tidak hanya muncul dari utang dan gejolak pasar, tetapi juga dari lemahnya pengawasan serta ketidaktransparanan penanganan bank bermasalah, sehingga kebijakan restrukturisasi perbankan dan bantuan IMF dapat dipahami sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam mengelola krisis. Namun, penggunaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi dalam analisis ini bersifat analogi konseptual, bukan pembuktian hubungan sebab-akibat secara empiris.

Krisis keuangan global 2007–2009 berakar pada pasar perumahan Amerika Serikat, ketika suku bunga rendah pasca-2001 mendorong permintaan rumah sekaligus meluasnya pinjaman berisiko yang kemudian dikemas menjadi surat berharga berbasis hipotek (MBS) dan collateralized debt obligation (CDO) serta dibeli secara luas oleh bank, perusahaan asuransi, dan dana lindung nilai; kelemahan regulasi, kekeliruan kebijakan, serta praktik spekulatif yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar turut memperbesar kerentanan sistem keuangan (MUSLIHAH dkk., 2024) . Dampaknya juga dirasakan Indonesia melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi, penarikan dana investor asing, pelemahan rupiah, penurunan harga saham dan obligasi, serta tekanan terhadap kecukupan modal perbankan (MUSLIHAH dkk., 2024) . Meskipun demikian, angka pertumbuhan PDB yang disebut dalam artikel tersebut perlu diverifikasi terlebih dahulu dengan data resmi BPS atau Bank Indonesia sebelum digunakan sebagai dasar kesimpulan.

Peringatan Al-Maqrizi bahwa pertumbuhan uang dan kredit yang melampaui produksi dapat merusak nilai uang memberikan analogi yang relevan terhadap gelembung harga dan ekspansi kredit dalam krisis keuangan global 2007–2009 (Al Mujaddid, 2026b; Darul, 2025b) . Dalam kerangka Ibnu Khaldun, krisis tersebut dapat dibaca sebagai fase naik yang berbalik arah ketika kepercayaan pasar dan insentif ekonomi mulai berubah. Pengalaman krisis juga membentuk kebijakan berikutnya, terlihat dari lemahnya pengawasan perbankan Indonesia pada masa itu serta upaya pemerintah mencegah terulangnya krisis 1998 (MUSLIHAH dkk., 2024) .

Lonjakan inflasi pascapandemi memperlihatkan hubungan antara siklus ekonomi dan pergerakan harga, ketika pertumbuhan global diperkirakan melambat dari 6,0% pada 2021 menjadi 3,2% pada 2022 dan 2,7% pada 2023, sementara inflasi global naik dari 4,7% menjadi 8,8% pada 2022 sebelum menurun secara bertahap (IMF, 2022). Pemulihan stabilitas harga menuntut kebijakan moneter yang konsisten, didukung kebijakan fiskal yang tertarget untuk meringankan beban biaya hidup, serta reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas dan mengurangi hambatan pasokan; pembagian peran ini sejajar dengan kerangka klasik yang menempatkan dimensi fiskal dan produktivitas pada pemikiran Ibnu Khaldun serta dimensi moneter dan tata kelola pada Al-Maqrizi (IMF, 2022). Di Indonesia, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dari 3,50% menjadi 4,75% hingga Oktober 2022 sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang didorong oleh harga pangan, minyak dan gas, upah, serta pelemahan rupiah (M. A. A. Alwa & Wahyudi, 2022b) .

Hubungan timbal balik antara inflasi dan siklus ekonomi tampak dari proyeksi IMF yang menggambarkan pertumbuhan global 2022–2023 sebagai profil terlemah sejak 2001, di luar krisis keuangan global dan fase akut COVID-19, bersamaan dengan lonjakan inflasi; dalam kerangka Ibnu Khaldun, perlambatan produksi menekan penerimaan negara, sedangkan dalam kerangka Al-Maqrizi, kenaikan harga memperberat biaya hidup masyarakat dan biaya usaha, sehingga pemerintah menghadapi dilema antara menjaga stabilitas harga dan menopang pertumbuhan (IMF, 2022). Tekanan tersebut juga tampak pada data Indonesia, ketika inflasi tahunan Desember 2022 mencapai 5,51% dengan inflasi bulanan 0,66%, terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, serta transportasi; beras dan tarif air minum PAM menjadi komoditas pendorong utama (Laporan Bisnis, 2023). Inflasi tahunan 2023 kemudian tercatat sebesar 2,61%, dengan kelompok pangan, minuman, dan tembakau sebagai salah satu penyumbang utama; kenaikan harga pangan dikaitkan dengan faktor alam berupa El Niño dan penurunan produksi beras pada 2023–2024, serta faktor manusia berupa penimbunan (*ihtikar*), distribusi dan logistik yang tidak efisien, serta kebijakan stabilisasi harga yang terlambat (Fadilah dkk., 2026b) . Pembagian faktor alam dan faktor manusia tersebut sejajar dengan klasifikasi Al-Maqrizi, meskipun penerapannya terhadap konteks Indonesia tetap bersifat analogis.

Ringkasan pembacaan atas tiga krisis di atas disajikan pada tabel berikut. Kolom pembacaan merupakan tafsir penulis, bukan kesimpulan sumber.

| Krisis | Pemicu utama | Pembacaan Ibnu Khaldun | Pembacaan Al-Maqrizi |
|---|---|---|---|
| Indonesia 1997-1998 | Utang valuta asing jangka pendek, rupiah terlalu kuat, perbankan rapuh, dan penutupan bank yang tidak transparan (Chalandra dkk., 2025) | Fase kemunduran setelah kemakmuran yang melahirkan kelengahan (Pipit dkk., 2025) | Lemahnya tata kelola dan pengawasan |
| Keuangan global 2007-2009 | Suku bunga rendah, pinjaman berisiko, dan sekuritisasi hipotek (Sari dkk., 2025) | Fase naik yang berbalik ketika kepercayaan berubah | Uang dan kredit tumbuh lebih cepat daripada produksi |

| Krisis | Pemicu utama | Pembacaan Ibnu Khaldun | Pembacaan Al-Maqrizi |
|---|---|---|---|
| Inflasi pascapandemi | Inflasi global diproyeksikan 8,8% pada 2022 (IMF, 2022); harga pangan, energi, upah, dan rupiah di Indonesia (Alwa & Wahyudi, 2022) | Perlambatan produksi menekan penerimaan | Guncangan pasokan dan pengelolaan moneter |

Kondisi terbaru menunjukkan bahwa persoalan inflasi masih berlangsung, ketika inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 mencapai 3,28%, naik dari 3,19% pada Agustus 2026 dan lebih tinggi dibandingkan 2,65% pada September 2025, dengan harga pangan dan emas sebagai pendorong utama (Kontan, 2026). Pangan sebagai pendorong utama mengingatkan pada klasifikasi Al-Maqrizi bahwa kelangkaan pasokan dapat menekan harga, sementara kebijakan yang tepat diperlukan agar tekanan tersebut tidak menjalar lebih luas. Secara keseluruhan, kerangka Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi tetap relevan untuk menekankan pentingnya pemerintahan yang adil, pajak yang proporsional, dan stabilitas moneter; namun, batasannya perlu disadari karena penelitian ini bersifat studi pustaka dan interpretatif, tidak menguji hipotesis secara statistik, serta konteks Mesir masa Mamluk berbeda dari ekonomi modern yang menggunakan uang fiat dan bank sentral. Karena itu, pemikiran kedua tokoh paling tepat diposisikan sebagai kerangka analisis yang melengkapi teori konvensional, bukan sebagai penggantinya.

**Implikasi Kebijakan**

Dari uraian di atas, dapat ditarik empat implikasi kebijakan. Pertama, perpajakan yang proporsional perlu diterapkan karena gagasan Ibnu Khaldun menekankan bahwa pungutan negara harus menjaga insentif produksi, sehingga kebijakan pajak sebaiknya mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya produksi dan pendapatan pelaku usaha (M. A. A. Alwa & Wahyudi, 2022b; Pipit Pipit dkk., 2025b) . Kedua, tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dari kebijakan stabilitas harga karena Al-Maqrizi menempatkan korupsi serta pengangkatan pejabat yang tidak cakap sebagai salah satu sumber inflasi (Al Mujaddid, 2026b; Darul, 2025b) .

Ketiga, disiplin moneter dan keseimbangan antara uang beredar dan produksi. Pencetakan uang yang berlebihan dipandang sebagai penyebab inflasi berkepanjangan (Al Mujaddid, 2026b) , sejalan dengan penekanan IMF (2022) agar kebijakan moneter menjaga stabilitas harga. Keempat, penguatan produksi dan pasokan, khususnya pangan, melalui reformasi struktural yang meningkatkan produktivitas dan melonggarkan hambatan pasokan (IMF, 2022), disertai pengawasan pasar terhadap penimbunan dan distribusi (Darul, 2025b; Fadilah dkk., 2026b) . Keempat implikasi ini merupakan arah umum, bukan resep teknis, dan penerapannya perlu menyesuaikan struktur ekonomi serta kapasitas kelembagaan yang berlaku saat ini

Dalam konteks Indonesia, implikasi tersebut berkaitan langsung dengan data yang ada. Inflasi tahunan sebesar 5,51% pada Desember 2022 dan 3,28% pada September 2026, dengan kelompok pangan sebagai salah satu pendorong, menunjukkan bahwa stabilitas pasokan pangan tetap menjadi isu sentral sebagaimana ditekankan Al-Maqrizi melalui pengalamannya terhadap krisis pangan di Mesir (Bisnis, 2023; Kontan, 2026). Respons moneter berupa kenaikan suku bunga acuan pada 2022 perlu disertai kebijakan

fiskal yang meringankan beban rumah tangga secara tertarget, sebagaimana disarankan IMF (M. A. A. Alwa & Wahyudi, 2022b; IMF, 2022). Kombinasi kebijakan tersebut sejajar dengan pembacaan terpadu dalam penelitian ini, yakni dimensi fiskal dan produktivitas pada Ibnu Khaldun serta dimensi moneter dan tata kelola pada Al-Maqrizi. Perbandingan pembagian beban antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan selama pandemi dengan praktik pencetakan uang berlebihan merupakan argumen penulis dan masih memerlukan pengujian lebih lanjut (Al Mujaddid, 2026).

**Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan**

Kajian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, analisis bersandar pada literatur sekunder dan bersifat interpretatif. Karena itu, pembacaan terhadap gagasan Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi, khususnya pemetaan ke dalam kategori inflasi konvensional serta penafsiran atas krisis modern, hanya berupa analogi konseptual dan tidak membuktikan adanya hubungan sebab-akibat. Kedua, tidak semua sumber sekunder mengulas kedua tokoh secara bersamaan, sehingga sintesis mengenai lintasan fiskal dan moneter yang saling memperkuat merupakan hasil rancangan penulis sendiri. Ketiga, perbedaan konteks sangat jelas: perekonomian Mesir pada era Mamluk berbasis koin logam, sementara ekonomi modern bertumpu pada uang fiat, bank sentral, dan sistem keuangan yang jauh lebih rumit. Keempat, beberapa angka dalam sumber sekunder, misalnya data dampak krisis 1997-1998 (Calanda dkk., 2025) dan perkiraan pengaruh pengendalian korupsi terhadap inflasi (Alwa & Wahyudi, 2022b), belum diverifikasi dengan data primer dari BPS maupun Bank Indonesia.

Mengingat keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) mengkaji langsung teks primer Muqaddimah dan Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah dalam bahasa aslinya agar tidak bergantung pada penafsiran sekunder; (2) menguji keterkaitan antara beban pajak, korupsi, jumlah uang beredar, dan inflasi dengan data empiris serta metode kuantitatif, misalnya data panel lintas negara atau deret waktu inflasi Indonesia; (3) memperluas perbandingan dengan pemikir ekonomi Islam klasik lainnya serta dengan teori konvensional seperti teori kuantitas uang dan kurva Phillips; dan (4) menelaah penerapan kerangka klasik pada isu kontemporer yang belum dibahas, seperti uang digital, kebijakan bank sentral modern, dan utang ppublik

## KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa gagasan Ibnu Khaldun tentang siklus ekonomi dan gagasan Al-Maqrizi tentang inflasi dapat dibaca sebagai dua pemikiran yang saling melengkapi. Ibnu Khaldun memandang kehidupan ekonomi sebagai bagian dari perjalanan peradaban yang melalui tahap kelahiran, pertumbuhan, kematangan, dan kemunduran, dengan pajak dan insentif produksi sebagai penggerak utama. Pajak yang ringan dan adil mendorong aktivitas usaha serta memperluas penerimaan negara, sedangkan pajak yang membebani melemahkan semangat berproduksi dan akhirnya mengurangi pendapatan negara itu sendiri. Al-Maqrizi membagi inflasi menjadi inflasi alami, yang bersumber dari bencana seperti kekeringan dan gagal panen, dan inflasi akibat kesalahan manusia, yang lahir dari korupsi dan buruknya pengelolaan pemerintahan, pajak yang berlebihan, serta jumlah uang beredar yang tidak terkendali. Ia menekankan perlunya standar moneter yang terjaga, pengawasan pasar, produktivitas sektor riil, dan perbaikan moral dalam penyelenggaraan negara.

Kedua tokoh bertemu pada peran negara serta hubungan antara pajak dan produksi, dengan menjadikan kualitas tata kelola, yaitu keadilan dalam pemungutan, kejujuran aparat, dan disiplin belanja, sebagai penentu stabilitas ekonomi. Mereka berbeda dalam penekanan analisis: Ibnu Khaldun menyajikan kerangka makro-siklikal, sedangkan Al-Maqrizi mengurai secara rinci bagaimana krisis harga terbentuk melalui pengelolaan uang. Perbedaan ini lebih tepat dipahami sebagai perbedaan fokus, bukan pemisahan yang tegas, sehingga kebijakan fiskal yang buruk dapat memicu kontraksi sekaligus tekanan harga, dan siklus ekonomi serta inflasi tidak layak dianalisis secara terpisah. Terkait krisis modern, kerangka keduanya menyediakan analogi konseptual yang berguna untuk membaca krisis moneter 1997-1998, krisis keuangan global 2007-2009, dan lonjakan inflasi pascapandemi, yang menunjukkan bahwa kerentanan yang menumpuk di masa kemakmuran, lemahnya pengawasan dan tata kelola, serta pertumbuhan uang dan kredit yang melampaui produksi dapat memperparah krisis.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik mencakup penerapan pajak yang proporsional, penguatan tata kelola dan pemberantasan korupsi, disiplin moneter yang menjaga keseimbangan antara uang beredar dan produksi, serta peningkatan produksi dan pasokan melalui reformasi struktural dan pengawasan pasar. Implikasi ini berupa arah umum, bukan resep teknis, sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan struktur ekonomi dan kapasitas kelembagaan masing-masing negara. Pada akhirnya, penelitian ini bersifat interpretatif, tidak menguji hipotesis secara statistik, dan berangkat dari konteks yang berbeda dengan ekonomi modern berbasis uang fiat dan bank sentral. Oleh sebab itu, pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi paling tepat ditempatkan sebagai kerangka analisis pelengkap bagi teori konvensional, bukan penggantinya, dengan sumbangan utama pada penekanan dimensi moral dan kelembagaan: keadilan, kejujuran, dan kebijakan yang bertanggung jawab turut menentukan capaian ekonomi suatu bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

Adlini, Anisya Octavia, S. (2022a). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, *6*(1).

Adlini, Anisya Octavia, S. (2022b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, *6*(1).

Al Mujaddid, N. S. (2026a). AL-MAQRIZI'S THEORY OF INFLATION: AN EXAMINATION OF IGHATSAH AL-UMMAH AND ITS RELEVANCE TO CONTEMPORARY INDONESIAN ECONOMIC PHENOMENA. *Journal Analytica Islamica*, *15*(3), 1025–1032.

Al Mujaddid, N. S. (2026b). AL-MAQRIZI'S THEORY OF INFLATION: AN EXAMINATION OF IGHATSAH AL-UMMAH AND ITS RELEVANCE TO CONTEMPORARY INDONESIAN ECONOMIC PHENOMENA. *Journal Analytica Islamica*, *15*(3), 1025–1032.

Alwa, A. (2022a). *INFLATION IN INDONESIA : IBN KHALDUN AND AL-MAQRIZI WORD*. *2*(2), 169–178. https://doi.org/10.21154/invest.v2i2.5099

Alwa, A. (2022b). *INFLATION IN INDONESIA : IBN KHALDUN AND AL-MAQRIZI WORD*. *2*(2), 169–178. https://doi.org/10.21154/invest.v2i2.5099

Alwa, M. A. A., & Wahyudi, A. (2022a). Konsep Inflasi: Perbandingan Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Al Maqrizi Serta Implikasinya Di Indonesia. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, *2*(2), 169–179.

Alwa, M. A. A., & Wahyudi, A. (2022b). Konsep Inflasi: Perbandingan Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Al Maqrizi Serta Implikasinya Di Indonesia. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, *2*(2), 169–179.

Borhan, J. T. b. (2022). *PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM*. *I*, 155–176.

Calanda, C. N., Hidayah, N., & Aulia, A. K. (2025). Gelombang Krisis 1997-1998: Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Babak Baru Ekonomi Indonesia. *Historia Pedagogia*, *14*(02), 25–39.

Darul, M. G. (2025a). Telaah Teori Inflasi Menurut Al-Maqrizi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, *4*(2), 210–221. https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.2286

Darul, M. G. (2025b). Telaah Teori Inflasi Menurut Al-Maqrizi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, *4*(2), 210–221. https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.2286

Fadilah, M. I., Milah, E. S., Ihsan, S. N., Marlina, L., & Diyana, A. F. (2026a). Pemikiran Al-Maqrizi tentang Inflasi dan Relevansinya terhadap Fenomena Kenaikan Harga Pangan di Indonesia. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *8*(1), 27–37.

Fadilah, M. I., Milah, E. S., Ihsan, S. N., Marlina, L., & Diyana, A. F. (2026b). Pemikiran Al-Maqrizi tentang Inflasi dan Relevansinya terhadap Fenomena Kenaikan Harga Pangan di Indonesia. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *8*(1), 27–37.

Fajar, S. (2025). Ibn Khaldun's Thought on Leadership and Economic Governance: Relevance to Sustainable Development. *CITANGKOLO: Contemporary Issues in Management, Governance, Knowledge, and Leadership Opportunities*. https://doi.org/10.5281/zenodo.19351735

Harahap, S. M. (2023). Money and inflation in Al-Maqrizi's Islamic economic theory. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, *11*(1), 1–12.

International Monetary Fund. (2022). *World economic outlook, October 2022: Countering the cost-of-living crisis*. https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022

Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. *1*, 1–9.

Mahanum. (2021a). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal Of Education*, *1*(2), 1–12.

Mahanum. (2021b). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal Of Education*, *1*(2), 1–12.

MUSLIHAH, M., RIFKI, M., & RASIDAH, N. S. (2024). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *MONETER: JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN Учредители: Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia*, *3*(1), 90–103.

Pipit Pipit, Nuri Kamilatul Pikriyyah, Wafa Jannatul Mawa, & Lina Marlina. (2025a). Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Siklus Ekonomi dan Pajak dalam Konteks Ekonomi Modern. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, *2*(2), 41–56. https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i2.926

Pipit Pipit, Nuri Kamilatul Pikriyyah, Wafa Jannatul Mawa, & Lina Marlina. (2025b). Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Siklus Ekonomi dan Pajak dalam Konteks Ekonomi Modern. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, *2*(2), 41–56. https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i2.926

Rahim, A. H. A. A., & Yani, A. (2021). MUQADDIMAH IBNU KHALDUN: STUDY OF ISLAMIC HISTORIOGRAPHY: Historiografi Islam. *Al-Hikmah*, *23*(2), 51–60.

Rahmadhona, R., Leonardo, A., & Darmawan, A. R. (2024). Implementasi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Kondisi Darurat Moneter Tahun 1998 Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, *4*(1), 1.

Romadhan, R. A., Aghliyah, S. P., & Aurelia, R. (2024a). *Buletin Ekonomika Pembangunan Pemikiran Al-Maqrizi dan Keynesian Tentang Teori Perbandingan Inflasi Dalam Perspektif Islam dan Konvensional Buletin Ekonomika Pembangunan*. *5*(2), 204–214.

Romadhan, R. A., Aghliyah, S. P., & Aurelia, R. (2024b). *Buletin Ekonomika Pembangunan Pemikiran Al-*

*Maqrizi dan Keynesian Tentang Teori Perbandingan Inflasi Dalam Perspektif Islam dan Konvensional Buletin Ekonomika Pembangunan*. *5*(2), 204–214.

Sendiabsari, R. T., & Budiarti, A. (2026). *ISLAM TENTANG KONSEP PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN NEGARA*. *3*(1).

Shawab, N., & Mujaddid, A. (2026a). *UMMAH AND ITS RELEVANCE TO CONTEMPORARY INDONESIAN ECONOMIC*.

Shawab, N., & Mujaddid, A. (2026b). *UMMAH AND ITS RELEVANCE TO CONTEMPORARY INDONESIAN ECONOMIC*.